

BUPATI KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA KARANG PAYAU KECAMATAN KELUMPANG HULU KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTABARU,

- Menimbang: a.
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 9 ayat 9 (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- bahwa berdasarkan Penelitian Dokumen Batas Desa dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 60 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sungai Kupang Jaya Kecamatan Kelumpang Selatan dengan Desa Karang Payau Kecamatan Kelumpang Hulu, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 61 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sangking Baru Kecamatan Kelumpang Selatan dengan Desa Karang Payau Kecamatan Kelumpang Hulu, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Bangkalaan Melayu dengan Desa Karang Payau Kecamatan Kelumpang Hulu, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 18 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sungai Kupang dengan Desa Karang Payau Kecamatan Kelumpang Hulu, serta dalam rangka tertib administrasi pemerintahan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa Karang Payau Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Karang Payau Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat: 1.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang 4. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelengaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 9. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
- 10. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sungai Bali dengan Desa Rampa Kecamatan Pulausebuku Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 7);
- 11. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 9 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sungai Bali dengan Desa Serakaman Kecamatan Pulausebuku Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 9);
- 12. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sungai Bali dengan Desa Ujung Kecamatan Pulausebuku Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA KARANG PAYAU KECAMATAN KELUMPANG HULU KABUPATEN KOTABARU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
- 4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 6. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 7. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titiktitik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titiktitik koordinat batas Desa.
- 8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan ditegaskan Batas Wilayah Administrasi Desa Karang Payau Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru dengan luasannya <u>+</u>4.994,97 hektare atau seluas <u>+</u>49,94 kilometer persegi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut:

a. Batas Utara : Desa Bangkalaan Melayu.

b. Batas Barat : Sungai dan Sangking Baru.

c. Batas Timur : Sungai Kupang.

d. Batas Selatan : Desa Sungai Kupang Jaya dan

Desa Sangking Baru.

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Karang Payau Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- 1. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 60 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Sungai Kupang Jaya Kecamatan Kelumpang Selatan dengan Desa Karang Payau Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 60) yaitu:
 - a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Desa Sungai Kupang Jaya Kecamatan Kelumpang Selatan dengan Desa Karang Payau Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru, kedua Desa sepakat dengan tarikan batas sesuai hasil kesepakatan dan rapat pembahasan tarikan garis batas wilayah kedua Desa);
 - b. Sepakat bahwa tarikan garis batas wilayah Desa Sungai Kupang Jaya Kecamatan Kelumpang Selatan dengan Desa Karang Payau Kecamatan Kelumpang Hulu dimulai dari titik 01 dengan titik koordinat X=398629 Y=9664328; dan
 - c. Dari titik 01 tarikan garis batas wilayah mengikuti aliran Sungai Tunggul Ulin menuju ke Sungai Sulangkayang, ke titik 02 dengan titik koordinat X=391590 Y=9663121.
- 2. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 61 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Sangking Baru Kecamatan Kelumpang Selatan dengan Desa Karang Payau Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 61) yaitu:
 - a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Desa Sangking Baru Kecamatan Kelumpang Selatan dengan Desa Karang Payau Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru, kedua Desa sepakat dengan tarikan batas sesuai hasil kesepakatan dan rapat pembahasan tarikan garis batas wilayah kedua Desa);
 - b. Sepakat bahwa tarikan batas wilayah Desa Desa Sangking Baru Kecamatan Kelumpang Selatan dengan Desa Karang Payau Kecamatan Kelumpang Hulu, dimulai dari titik 01 dengan titik koordinat X=398628 Y=9664329 (Pertigaan antara Desa Sangking Baru, Desa Karang Payau dan Desa Sungai Kupang Jaya/diberi nama Sungai Badaun);
 - c. Dari titik 01 garis batas wilayah mengikuti Lahan garapan masyarakat ke titik 02 dengan titik koordinat X=403698 Y=9667107); dan
 - d. Dari titik 02 garis batas mengikuti aliran Sungai Mangaris Balantak ke titik 03 dengan titik koordinat X=399266 Y=9668468 (Muara Sungai Haliling).
- 3. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Desa Bangkalaan Melayu dengan Desa Karang Payau Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 17) yaitu:
 - a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Desa Bangkalaan Melayu dengan Desa Karang Liwar Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru, kedua Desa sepakat tarikan adminitrasi desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat X=388695 Y=966961 (titik koordinat berada pada Pertigaan batas administrasi antara Desa Bangkalan Melayu);

- b. Dari titik 01 garis batas wilayah administrasi mengikuti jalan menuju ke titik 02 dengan titik koordinat X=394260 Y=966758); dan
- c. Dari titik 02 garis batas wilayah administrasi mengikuti sungai menuju ke titik 03 dengan titik koordinat X=401319 Y=967043).
- 4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 18 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Desa Sungai Kupang dengan Desa Karang Payau Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 18) yaitu:
 - a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Desa Sungai Kupang dengan Desa Karang Payau Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru, kedua Desa sepakat tarikan batas adminitrasi desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat X=388695 Y=966961 (titik koordinat berada pada Pertigaan batas administrasi antara Desa Bangkalaan Melayu, Desa Sungai Kupang dan Desa Karang Payau);
 - b. Dari titik 01 garis batas wilayah administrasi mengikuti tarikan hasil Delineasi Batas tahun 2018 menuju ke titik 02 dengan titik koordinat X=389176 Y=9669369 (titik koordinat berada pada Sungai Cantung); dan
 - c. Dari titik 02 garis batas wilayah administrasi mengikuti jalan PAM pabrik kelapa sawit menuju ke titik 03 dengan titik koordinat X=391622 Y=966312 (titik koordinat berada pada pertigaan atau tugu batas administrasi Desa Karang Payau, Desa Sungai Kupang Jaya dan Desa Sungai Kupang).

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas Wilayah Administrasi Desa Sungai Bali Kecamatan Pulausebuku dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

> Ditetapkan di Kotabaru pada tanggal 5 April 2022

BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru pada tanggal 5 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

SETDA

ABA

SAID ARHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2022 NOMOR 23

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR: 23 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA KARANG PAYAU KECAMATAN KELUMPANG HULU
KABUPATEN KOTABARU

